

EVALUASI PROGRAM KESEHATAN GERAKAN BASNO DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT *BASED OF LOGIC MODEL*

Muhamad Junaedi

Prodi Administrasi Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi, Indonesia
Corresponding Author: muhammadjunaedi234@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History: Received: 21-12-2023 Accepted: 26-12-2023</p>	<p><i>BASNO is an environmentally conscious program that has been prioritized by the government of West Nusa Tenggara Province since 2012 as a pioneering effort to Life Expectancy Figures by discharging at random zero in NTB. The evaluation of the BASNO program is carried out by the method of descriptive observation by collecting data collectively by answering evaluation questions that can extend the audit of the program's enforceability with the Basic Logic Model. The results of the evaluation of the BASNO program showed that access to healthy latrines, which is the main program in each village, has increased continuously every year by 64.76%.</i></p>
<p>Keywords: <i>BASNO, Life Expectancy Figures, Logic Model</i></p> <p>Kata Kunci: <i>BASNO, Angka Harapan Hidup, Logic Model</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Gerakan BASNO merupakan program sadar lingkungan yang di prioritaskan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2012 sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup dengan buang air sembarang nol di NTB. Evaluasi program gerakan BASNO dilakukan dengan metode observasi deskriptif untuk mengumpulkan data secara kolektif dengan menjawab pertanyaan evaluasi yang dapat menggambarkan audit keterlaksanaan program dengan <i>Basic Logic Model</i>. Hasil evaluasi program BASNO ini menunjukkan akses jamban sehat permanen yang menjadi program utama pada tiap desa dan mengalami peningkatan yang terus menerus setiap tahunnya sebesar 64,76%.</p>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) .

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah yang masih perlu perhatian khusus dalam sektor kesehatan. Kesadaran masyarakat NTB untuk tidak membuang air sembarang masih rendah, pada taun 2013 NTB menduduki posisi ke 32 di Indonesia. Fakta tersebut didukung dengan kondisi geografis masyarakat NTB yang tinggal di pelosok desa sehingga masih terbiasa dengan BAB sembarang dan kurangnya akses jamban sehat.⁽¹⁾

Saat ini, provinsi NTB sedang dihadapkan pada masalah beban ganda pasa sektor kesehatan, penyakit infeksi menular pada saluran pernafasan berkaitan erat dengan isu kesehatan lingkungan dan gaya hidup tidak sehat masyarakat. Disamping itu, penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes melitus juga menunjukkan peningkatan dan termasuk sepuluh daftar penyakit yang menjadi fokus penanganan bagi pemerintah. Perubahan gaya hidup yang cenderung kearah negatif kerap kali menjadi masalah utama bagi kesehatan seperti mengonsumsi makanan cepat saji, *junk food* dan kurangnya aktifitas fisik.⁽²⁾

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai program kesehatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah program kesehatan Gerakan Buang Air Sembarang Nol (BASNO) yang dimulai sejak tahun 2012 hingga sekarang. Program kesehatan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi sanitasi sehingga mampu menekan perkembangan penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan Umur Harapan Hidup.^{(1),(3)}

Gerakan sadar lingkungan yang disebut Gerakan BASNO (Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol) yang diprogramkan pemerintah diharapkan dapat memusatkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya menjaga sanitasi lingkungan dengan tidak membuang tinja manusia dengan sembarang. Gerakan ini dilandaskan pada keprihatinan akan kondisi akses masyarakat pedesaan terhadap sanitasi dalam kurun waktu 28 tahun terakhir yang tidak mengalami peningkatan. Program ini sejalan dengan tujuan Dinas Kesehatan NTB untuk membentuk masyarakat yang mandiri, mempunyai kemauan, kemampuan dan kemandirian dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan terbiasa mengakses pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.⁽⁴⁾

Dinas kesehatan NTB dalam profil kesehatan masyarakat menyebutkan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan mencapai 66,69 dan menjadi 67,07 pada tahun 2022 setelah adanya berbagai program kesehatan dari pemerintah, akan tetapi peningkatan tersebut masih jauh dibawah standar UHH secara nasional sebesar 71,85 dan masih dibawah Bali, NTT dan Sulawesi Selatan. Kota Mataram memiliki UHH tertinggi sedangkan Lombok timur menjadi kabupaten dengan UHH terendah. Walauapun demikian peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan taraf kehidupan masyarakat menuju lebih baik.⁽³⁾

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observasi menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data secara kolektif dengan menjawab pertanyaan evaluasi yang dapat menggambarkan audit keterlaksanaan program. Data yang dikumpulkan berupa data primer dengan mengumpulkan laporan-laporan program kesehatan dari Dinas kesehatan NTB yang disusun di profil kesehatan NTB setiap tahunnya. Evaluasi program Gerakan BASNO dilakukan dengan rancangan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan hambatan dan kendala program, menilai apakah program telah diimplementasikan sesuai rencana, gambaran jangkauan dan sasaran serta tingkat kemudahan dalam menganalisis capaian program dengan melihat persentase pada masing-masing Kabupaten/kota. Selanjutnya menjawab pertanyaan *Why* (mengapa/apakah) program berjalan baik atau tidak baik sesuai rencana, dan yang terakhir mampu menjelaskan proses, apa yang terjadi pada program Gerakan BASNO dan bagaimana dampaknya pada hasil program.

HASIL

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah 18.572,32km² yang berbatasan langsung dengan pulau dewata Bali dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk 5.217.338 orang dengan 8 kaputen terdiri dari 2 kota dan 116 kecamatan dengan 995 desa dan 142 kelurahan yang memiliki karakter dan ciri khas wilayah masing-masing.

Tabel 1 Profil Wilayah Provinsi NTB⁽⁵⁾

	Jumlah
Luas Wilayah	20.153,15km ²
Penduduk	4.995.578
Kabupaten	8
Kota	2
Kecamatan	116
Desa	995
Kelurahan	142

Berdasarkan data sasaran dan jangkaun keterlaksanaan gerakan BASNO di provinsi NTB diukur pada capaian akses jamban sehat/layak dari total 1.137 Desa/kelurahan yang sudah melaporkan data adalah sebesar 64,76%, terlihat pada table 2 menunjukkan cakupan gerakan BASNO pada masing-masing Kabupaten/kota di NTB hingga Desember 2019.

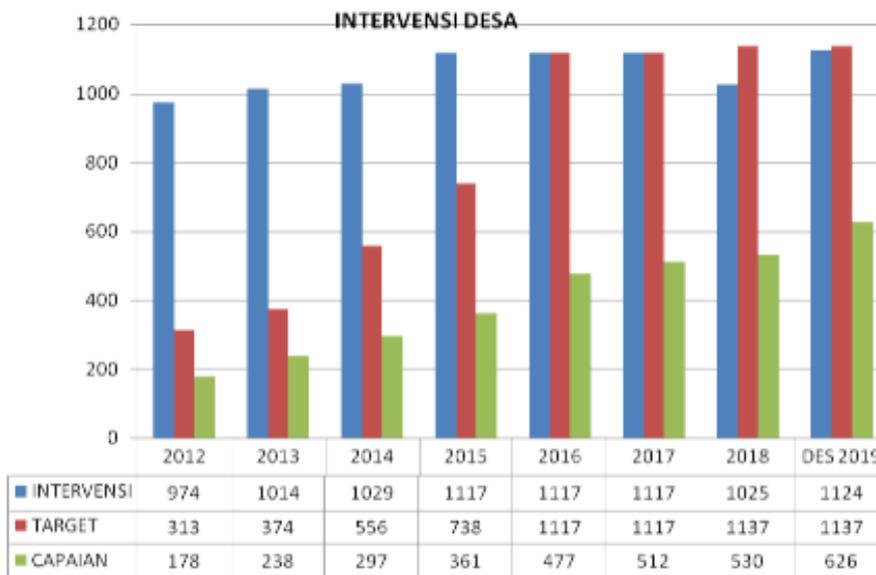
Tabel 2.
Cakupan Program Gerakan BASNO NTB⁽¹⁾

No.	Kabupaten/kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	KK	JSP	% Akses JSP
1.	Kab. Lombok Barat	10	122	185,868	93,798	50,13
2.	Kab. Lombok Tengah	12	139	318,142	179,046	55,81
3.	Kab. Lombok Timur	20	254	395,351	276,396	69,74
4.	Kab. Lombok Utara	5	33	33,996	33,996	47,69
5.	Kab. Sumbawa	24	165	119,762	84,254	68,33
6.	Kab. Dompu	8	79	61,371	31,55	50,59
7.	Kab. Bima	18	191	122,855	78,457	62,71
8.	Kab. Sumbawa Barat	8	65	38,575	37,219	94,63
9.	Kota Mataram	6	50	71,744	103,937	89,89
10.	Kota Bima	5	38	39,020	25,763	66,03
		116	1137	1,468,087	944,601	64,76

Sumber: Kombinasi Data Monev STBM, SSK, Monev BPPW, Monev DAK & Data keberfungsian IPLTS LSS 2019.

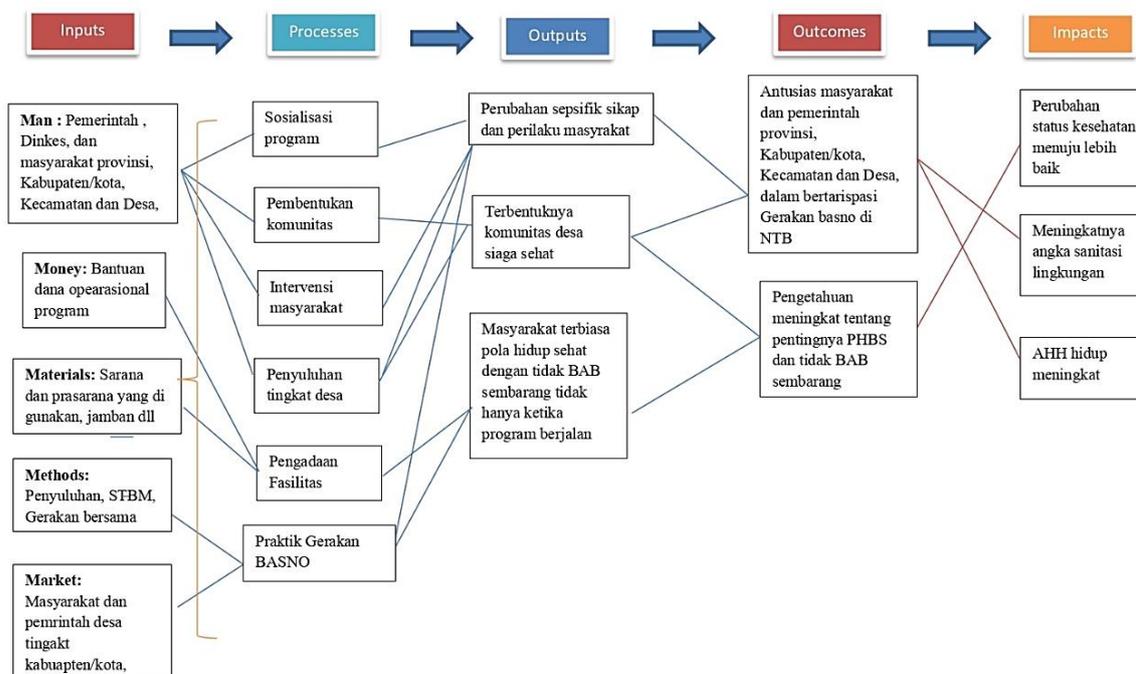
Keterangan: JSP =Jamban Sehat Permanen

Grafik 1.
Capaian Desa/kelurahan melaksanakan STBM/BASNO⁽¹⁾



Pada Grafik 1 ditunjukkan Desa/kelurahan sampai dengan Desember 2019 menunjukkan peningkatan yang konstan dalam menjalankan program BASNO namun ketercapaian program masih sangat jauh jika dibandingkan dengan target capaian tiap tahunnya. Pada akhir tahun 2019 terdapat 1124 desa yang diintervensi untuk menjalankan gerakan BASNO bahkan masih kurang dari target sebanyak 1137 dan hanya setengahnya yang mencapai sasaran target yaitu 626 desa.

Grafik 2
Identifikasi Program Gerakan BASNO dengan *Logic Models*



PEMBAHASAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjamin air bersih dan sanitasi layak dalam rangka menjamin ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan menjadi agenda global pada tahun 2030 sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kualitas hidup yang lebih baik. Upaya pemerintah untuk mewujudkan itu dengan membuat program pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) menggunakan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).⁽⁶⁾ Tujuan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada RPJMN 2020-2024 melalui pilar ke-4 tentang kesejahteraan yang harus terus meningkat melalui tujuh agenda pembangunan diantaranya terdapat upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.⁽⁷⁾

Kondisi pengelolaan lingkungan dan akses air bersih di Indonesia masih membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah hal tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.⁽⁸⁾ Oleh karenanya Gerakan BASNO sebagai program kesehatan dari pemerintah daerah harus terus digalakkan agar tidak ada lagi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh tinja manusia.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan SDGs dan target RPJMN tersebut melalui visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD NTB 2005-2025 yaitu membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang dengan keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan dikancah nasional dan internasional dengan komitmen kepercayaan bahwa pembangunan harus terus di upayakan. Berdasarkan nilai indeks kualitas air secara nasional Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat kedua terendah secara nasional dengan nilai 20,25 dengan parameter biologi yaitu *Escherichia coli*. Indikator agregat lain yang menjadi tolak ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sector kesehatan berupa Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi yaitu 24 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup,⁽⁹⁾ sedangkan kasus gizi buruk masih terbilang tinggi sepanjang tahun 2019 mencapai 274 kasus.⁽¹⁰⁾

Kondisi tersebut tentu disebabkan karena rendahnya akses sanitasi serta kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam mengantisipasi berbagai kasus tersebut maka Provinsi NTB dalam pengelolaan sanitasi memiliki kebijakan spesifik dan khusus, yaitu gerakan Buang Air Besar Sembarangan nol (BASNO), hingga menuju sanitasi aman. Dengan gerakan BASNO, Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang inovatif dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam pengelolaan sanitasi melalui gerakan BASNO, diharapkan kondisi sanitasi di NTB dapat meningkat secara signifikan, sehingga berbagai penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan yang pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Gerakan BASNO yang sudah dilaksanakan selama 10 tahun, cukup mampu mendorong peningkatan akses sanitasi masyarakat NTB dalam pelaksanaannya. Untuk lebih mengoptimalkan gerakan BASNO menuju sanitasi aman, dipandang perlu memiliki *road map* atau peta jalan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi dalam rangka keberlanjutan gerakan BASNO menuju Sanitasi Aman di NTB.^{(1),(11)}

Evaluasi program gerakan BASNO dilakukan untuk mengukur ketercapaian program kesehatan terhadap perencanaan dengan implementasinya di masyarakat. Pada evaluasi program kesehatan ini menggunakan *Logic Models* dengan mengukur kesesuaian perencanaan, implementasi, dan ketercapaian pada tiap unsur yang harus dipenuhi program seperti *Inputs, Processes (activities), outputs, outcomes, Impacts*.⁽¹²⁾ Oleh karenanya evaluasi program kesehatan gerakan BASNO di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

Inputs diartikan sebagai pelaksana, pelaku dan sarana prasarana yang menunjang keterlaksanaan program. Pelaksanaan gerakan pemerintah provinsi NTB sebagai penanggung jawab program dan penyandang dana, Dinkes Provinsi NTB sebagai pelaksana dan monitoring program, seluruh rumah sakit dan puskesmas merupakan naungan Dinkes NTB, seluruh pemerintah dan elemen Kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa sebagai target program sekaligus pelaksana,

finansial, sarana dan prasana di berikan dalam bentuk bantuan operasional kesehatan oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada Desa, kecamatan dan Kabupaten/kota dalam pencapaian kesehatan promotif dan preventif sesuai target RPJMD 2019. Pelaku program dari beberapa unsur juga dilibatkan diantaranya Dinas Permukiman SNVT Perumahan, yayasan Plan Internasional Indoensia, Balasi Prasarana Pemukiman Wilayah NTB, Baznas, YMP (Yayasan Masyarakat Peduli) dengan program dan wilayah kerja masing-masing. Selain itu berbagai pihak seperti LSM, swasta, perguruan tinggi, media dan organisasi sosial serta keagamaan lainnya memberikan dukungan terhadap program ini. Dukungan yang diberikan meliputi pengembangan kapasitas, pengembangan pilihan teknologi, memfasilitasi pengembangan mekanisme jejaring pemasaran, pengembangan media, memberikan fasilitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pertemuan.

Processes (activities) didefinisikan sebagai apa saja yang dilakukan oleh pelaksana dengan sumber daya yang ada. Aktivitas meliputi kegiatan, proses atau intervensi yang ditujukan untuk mencapai hasil atau perubahan yang di harapkan. Dalam kegiatan gerakan BASNO ini pelaksana yaitu Dinkes NTB selain menyalurkan bantuan finansial dari Pemprov mereka juga memonitoring kegiatan serta melakukan monitoring penggunaan anggaran kegiatan kepada sasaran kegiatan, sedangkan pelaksana program inti adalah pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota melaksanakan program melalui petugas-petugas kesehatan di masing-masing elemen sehingga saling terintegrasi.

Pelaksanaan program di setiap elemen oleh petugas kesehatan di lakukan beragam, kreatifitas dalam memberikan intervensi kepada masyarakat di berikan kebebasan, seperti penyuluhan kesehatan, mengadakan fasilitas dalam bentuk jamban agar mengurangi buang air besar sembarangan oleh masyarakat, pembentukan komunitas yang memantau kesehatandan STBM, pengadaan desa siaga sehat, pengelolaan limbah cair, penguluhan sampah, program PHBS.⁽¹³⁾⁽¹⁴⁾

Inisiatif Pemerintah Kabupaten (Bima, Dompu, Sumbawa Barat dan Lombok Tengah) yang memberikan dukungan regulasi dalam rangka memperkuat strategi Enabling Environment sesuai Komponen dalam STBM. Kabupaten Bima dan Dompu mendukung melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum dan Peyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, sedangkan Kabupaten Lombok Tengah melalui Gerakan Pembangunan Sanitasi Masyarakat (Gerbang Samas). Sementara Kabupaten Sumbawa Barat berhasil membuat kabupaten terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan adalah melalui Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program STBM. Pendanaan. Pemanfaatan dana desa, dana Zakat Infak Sodakoh, hibah lahan untuk mendukung pendanaan pembangunan jamban keluarga dan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.^{(1),(15)}

Pelaksanaan Gerakan BASNO di seluruh Kabupaten/kota, kecamatan dan desa di implementasikan secara menyeluruh dengan mengadakan seperti perlombaan antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa di seluruh Provinsi NTB. Setiap elemen tersebut di berikan kesempatan membuat proposal kegiatan dan meminta bantuan dana program kepada Dinas Kesehatan NTB untuk melaksanakan program Gerakan BASNO sesuai dengan SAP yang telah di tentukan. *Feedback* adalah setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa apakah akan di lombakan dan di berikan penilaian yang mempunyai tempat yang sudah tertib dan tidak buang air sembarang reward Desa/Kelurahan BASNO/ODF Rp. 10.000.000, reward Kecamatan BASNO/ODF Rp. 50.000.000, reward Kabupaten BASNO/ODF Rp. 1.000.000.000.⁽¹⁾

Outputs merupakan produk atau hasil langsung dari implementasi aktivitas program dapat meliputi jenis, level dan target yang dicapai program. Dalam program Gerakan BASNO ini output dapat dilihat langsung dari antusias dan keikutsertaan setiap desa, kecamatan dan kabutan/kota dengan melihat berapa banyak kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang ikut melaksanakan program Gerakan BASNO dan bentuk intervensi kesehatan yang di berikan kepada setiap elemen sebagai bentuk pelaksanaan program BASNO. Berdasarkan laporan roadmap Gerakan BASNO 2020-2023 Desa/Kelurahan yang melakukan STBM tahun 2020 baru 10 Desa atau Kelurahan 3 tahun terakhir masih kosong, Desa yang mencapai BASNO terverifikasi.

Outcomes merupakan hasil jangka pendek dan menengah dari program Gerakan BASNO pada tingkat populasi yang dapat dilihat melalui perubahan spesifik pada pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang telah diukur dan dinilai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dan dilaporkan oleh pelaksana program di setiap elemen seperti kabupaten/kota, kecamatan, dan desa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sadar tidak membuang air besar sembarangan, peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan lingkungan, menjalankan PHBS dan lain sebagainya merupakan perubahan jangka pendek yang dapat dilihat, perubahan jangka menengah dapat dilihat dari masyarakat di setiap elemen membiasakan pola hidup seperti di atas mejadi kebiasaan tidak hanya ketika program berjalan.

Impacts merupakan perubahan *fundamental* yang diharapkan pada masyarakat atau sistem sebagai hasil dari aktivitas program salah satunya adalah perubahan status kesehatan di setiap elemen baik Kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sebagai wujud keterlaksanaan program sehingga dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) di provinsi NTB dan pada akhirnya setelah di adakan evaluasi di temukan bahwa sanitasi di sleuruh provinsi NTB membaik, derajat kesehatan dan angka harapan hidup juga meningkat terhitung sejak laporan Dinkes NTB dengan pada tahun 2018 yaitu capain target persentase program sebesar 63,79%.⁽³⁾

Berikut beberapa hasil kajian evaluasi gerakan BASNO berdasarkan data laporan keterlaksanaan Basni di provinsi NTB:

1. Pemantaun Kondisi lingkungan berdasarkan Profil kesehatan NTB 2018 Sarana air minum memenuhi syarat dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dapat menentukan parameter kualitas air yang akan diperiksa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air, instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan. Di Provinsi NTB terdapat 78.408 sarana air minum, dari jumlah tersebut yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) adalah 8.635 sarana air minum atau 11%. Dari seluruh sarana air minum yang dilakukan inspeksi, ditemukan 8.371 (96,94%) sarana air minum dengan resiko rendah dan sedang.
2. Pada tahun 2018, sarana air minum yang dilakukan pemeriksaan sangat sedikit yaitu hanya 0,02% (17 sarana) dari total sarana yang ada dan dari 17 sarana yang diperiksa, menunjukkan hasil 13 sarana memenuhi syarat sesuai standart persyaratan kualitas air minum yang tertuang dalam Permenkes No 492 Tahun 2010. Jumlah sarana air minum yang diperiksa sangat sedikit kemungkinan disebabkan tidak adanya atau terbatasnya alokasi anggaran untuk pemeriksaan air minum di laboratorium.
3. Keluarga dengan Akses Terhadap Sanitasi Layak (Jamban Sehat), fasilitas sanitasi yang layak (Jamban Sehat) adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Akses pada sanitasi khususnya pada penggunaan jamban sehat, saat ini memang masih menjadi masalah serius di Provinsi NTB. Masih tingginya angka buang air besar pada sembarang tempat (open defecation), menjadi salah satu indikator rendahnya akses ini. Keluarga yang mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) pada tahun 2018 sebesar 85,90%, artinya sebanyak 14,10% penduduk tidak mempunyai akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak terdiri dari yang menggunakan jamban sehat permanen (JSP) 61,77%, menggunakan jamban sehat semi permanen (JSSP) 10,47% dan yang menggunakan jamban secara sharing/komunal 13,66%.⁽³⁾
4. Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi meliputi 5 pilar yaitu tidak buang air besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
5. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya berbudaya hidup bersih, mengubah perilaku masyarakat dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Program STBM telah dimulai sejak tahun

2006. Kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

6. Dalam pelaksanaan program STBM, hasilnya terbagi menjadi 3 kriteria yaitu Desa melaksanakan STBM, Desa stop BABS dan Desa STBM. Desa melaksanakan STBM merupakan Desa yang sudah melakukan pemukiman minimal 1 dusun mempunyai tim kerja masyarakat/Natural Leader dan telah mempunyai rencana tindak lanjut/ rencana kerja masyarakat untuk menuju Sanitasi Total. Desa Stop BABS (SBS) / ODF (Open Defecation Free) adalah Desa yang penduduknya 100 % mengakses jamban sehat. Desa STBM Desa yang telah mencapai 100 % penduduk melaksanakan 5 pilar STBM Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2018 adalah 1.140 Desa/Kelurahan. Dari 1.140 Desa/Kelurahan tersebut sebanyak 1.120 (98,25%) merupakan Desa Melaksanakan STBM sebanyak 558 (48,95%) merupakan Desa Stop BABS dan di 10 Kabupaten/Kota belum ada Desa STBM (0%).
7. Tempat Umum Sehat merupakan tempat umum yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Tempat-tempat umum (TTU) memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap TTU dilakukan untuk mewujudkan hasil inspeksi sanitasi tahun 2018 di kabupaten/kota diperoleh hasil bahwa TTU yang memenuhi syarat kesehatan di Provinsi NTB sebanyak 72,21%, sehingga dapat diketahui bahwa sebanyak 27,79% TTU tidak memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat di sarana TTU banyak masyarakat berkumpul, lebih utamanya lagi sarana kesehatan yang terdiri dari puskesmas dan rumah sakit.
8. Sarana Kesehatan yang ada tidak seluruhnya memenuhi syarat kesehatan, Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan hanya 86,75% dan rumah sakit yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 86,67%. Hal ini sangat memprihatinkan, karena di sarana kesehatan banyak masyarakat yang datang berobat dan berkunjung, sehingga potensi penyebaran infeksi nosokomial cukup tinggi. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Kesehatan, hasil inspeksi sanitasi tahun 2018 di kabupaten/kota diperoleh hasil bahwa TPM yang memenuhi syarat hygiene sanitasi sebesar 58,04% dan yang tidak memenuhi syarat cukup besar yaitu sebanyak 41,96%.

KESIMPULAN

Gerakan BASNO (Gerakan Buang Air Besar Sembarang Nol) terus diperhatikan dan di upayakan menuju lebih baik sebagai upaya memperbaiki akses sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat. Sejak adanya program gerakan ini di Provinsi NTB, telah mendorong kesadaran masyarakat untuk menerapkan hidup *hygen* berbasis desa STBM yang di gunakan sebagai upaya menegakkan 5 pilar yaitu tidak buang air besar sembarang, mencuci tangan dengan sabun, mengelola air minum dan makanan, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan benar.

SARAN

Gerakan BASNO ini masih terbilang baru karena masih 12 tahun berjalan dengan angka yang masih tidak terlalu cukup tinggi perubahannya, di harapkan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/kota melakukan sosialisasi program lebih aktif lagi sehingga dapat menjamah perkampungan dan pelosok desa dengan pola fikir tentang kesehatan yang masih tradisional (*traditional thinking*) terhadap BASNO.

DAFTAR PUSTAKA

1. POKJA AMPL-BM. Roadmap BASNO Menuju Sanitasi Aman Nusa Tenggara Barat 2020-2023. Unicef. 2020. 1–157 p.

2. Primadianti N, Sugiyanto C. Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. *J Din Ekon Pembang*. 2020;3(1):1–20.
3. Wahyudin, Rusyda MI, Manshur, M.Faiq Syaafiqi Awwali Verlita R. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2023. 1–106 p.
4. Mboi N. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2014. 1–40 p.
5. NTB BPSP. Luas Daerah Nusa Tenggara Barat. 2017.
6. Ronika ZC, Dorothy A, Manullang X, Desi D, Tarina Y. Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Dalam Pembangunan. 2022;(May):3.
7. Irawan AD. Gambaran Analisis Pembangunan Kesehatan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *J Kesehat Tambusai*. 2022;3(3):369–73.
8. Junaedi M. Sanitasi, Pengelolaan dan Akses Air Bersih Untuk Peningkatan Kesehatan di Indonesia. *J Tampiasih*. 2022;1(1):6-10.
9. SDKI. Survei Demografi dan kesehatan Tahun 2017. *Kesehat Reproduksi Remaja*. 2018;125–7.
10. Rahman AA, Wulandari RA. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. 2019. 1–92 p.
11. BAPPEDA N. No Title. In. Available from: <https://bappeda.ntbprov.go.id/nusa-tenggara-barat-menuju-buang-air-besar-sembarang-nol-BASNO-2023/>
12. Setyorini RH. Open access Open access. Citizen-Based Mar Debris Collect Train Study case Pangandaran. 2021;2(1):56–61.
13. Pappas DE, Hendley JO. The common cold and decongestant therapy. *Pediatr Rev*. 2011 Feb;32(2):47–54; quiz 55.
14. Ismunandar AN. Analisis Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. *J Ilm Kesehat Sandi Husada*. 2021;10(2):484–91.
15. Unicef. www.unicef.org/indonesia/reports/compendium-of-good-practices. 2021. p. 1–12 Lampiran 2021.